

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arab Saudi merupakan salah satu Negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki wilayah geografis dan sumber daya alam minyak bumi terbesar di Timur Tengah, meliputi seperempat minyak dunia. Hal ini pula membuat Arab Saudi sebagai pengontrol utama lajunya perdagangan minyak di Timur Tengah, mulai dari penentuan harga minyak hingga penjualannya. Dengan status sebagai negara Petro Dollar dan pengontrol sumber daya minyak di dunia, menjadikan Arab Saudi memiliki senjata politik dan diplomasi yang sangat kuat dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan politik luar negeri, demi menjaga stabilitas politik di dalam kawasan.

Arab Saudi merasa perlu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar terlebih negara-negara di lingkaran Arab, karena kondisi wilayah ini akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas dan kepentingan dalam negeri Arab Saudi secara keseluruhan. Kebijakan Arab Saudi dalam kerjasama di kawasan Arab ini berdasarkan prinsip persaudaraan dan solidaritas yang menawarkan segala dukungan dan bantuan (Karim, 2015). Salah satu negara yang perlu untuk melakukan hubungan diplomatik yaitu Iran. Iran menjadi negara yang diprioritaskan untuk melakukan kerjasama oleh Arab Saudi. Arab Saudi menganggap Iran memiliki pengaruh besar di Timur Tengah, dimana Iran berhasil menjadi pengaruh bagi empat negara di kawasan Timur Tengah yaitu Iraq, Lebanon, Syiria dan Yaman (Karim, 2015). Selain itu, Iran berbatasan langsung

dengan negara-negara teluk Arab yang menjadi lingkaran pertama kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Hubungan bilateral Arab Saudi dengan Iran sudah dimulai sejak berdirinya dinasti Al-Saud pada 1928. (Patnistik, Egidius, 2016). Pada 1955 Kepala negara Arab Saudi, Raja Saud melakukan kunjungan formal ke Iran untuk pertama kalinya guna memperkuat hubungan kedua negara tersebut. Kemudian, pada 1957 Shah Pahlevi yang saat itu menjadi Raja Iran membalas kunjungan Raja Saud dengan mengunjungi Arab Saudi pada Maret tahun 1957 untuk membahas lebih lanjut hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Pada tahun 1966, Raja Faisal yang saat itu menjabat sebagai Kepala Negara Arab Saudi menggantikan Raja Saud mengunjungi Iran kembali untuk memperkuat kerjasama kedua negara tersebut guna menjaga kepentingan dalam negeri Arab Saudi itu sendiri. Diikuti dengan penandatanganan perjanjian demokrasi diantara kedua negara pada tahun 1968.(Adib-Moghaddam, 2016). Invasi Iraq ke Kuwait pada bulan Agustus 1990 membantu perbaikan hubungan Arab Saudi dan Iran. Dimana hubungan diplomatik antar kedua negara ini memasuki fase baru dan ketegangan antar kedua negara semakin berkurang. Teutama setelah tuduhan terhadap Iran yang dengan sengaja menyebarkan pergerakan revolusi di Timur Tengah.

Pada era pemerintahan President Rafsanjani dan Presiden Khatami merupakan era terbaik dalam hubungan Arab Saudi dan Iran. Raja Fahd dan Presiden Rafsanjani melakukan pertemuan pada bulan Maret tahun 1991, di Riyadh membahas hubungan bilateral kedua negara dan perjanjian tentang Haji. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi

yaitu Saud al-Faysal ke Tehran Pada bulan April 1991. Pertemuan ini merupakan pertemuan bersejarah, karena merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi Arab Saudi ke Iran semenjak Revolusi Iran. (Al-Suwaidi, 1996)

Dengan bergantinya kepemimpinan di kedua negara dan revolusi Iran, tidak membuat hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran menjadi buruk. Hubungan baik diantara kedua negara terus berjalan. Kerjasama terjalin dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan Raja Fahd dan Menteri Luar Negeri Iran Kamal Kharrazi serta Menteri Pertahanan Iran Shamkhani di Arab Saudi tahun 1992 guna membahas kerjasama ekonomi antara dua negara tersebut.

Raja Fahd mengajukan pembentukan komisi ekonomi untuk menghilangkan larangan impor Arab Saudi ke Iran yang terjadi tahun 1988 dan menambah kuota Haji bagi jamaah asal Iran menjadi 120.000 orang. Hal ini tentu saja menguntungkan Arab Saudi karena dapat meningkatkan stabilitas perdagangan dan ekonomi dalam negeri Arab Saudi sendiri. Pada bulan juli 1997 Arab Saudi membuka kembali jalur penerbangan ke Iran guna memperlancar hubungan diplomatik antara keduanya. Pada september tahun ini juga, diadakan pertemuan puncak OKI kedelapan di Tehran, Pangeran Abdullah dari Arab Saudi akan hadir dalam pertemuan tersebut dan juga untuk membahas pembentukan *High Joint Annual Committe* antara kedua negara. Hal ini sebagai dasar dalam membentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi yang aktif antara kedua negara. Pangeran Abdullah menyadari potensi dan kapabilitas yang dimiliki Iran, sehingga Ia menganggap bahwa hubungan keduanya bisa menjadi kunci untuk

perkembangan regional wilayah Teluk. (Altoraifi 2012, 212)

Pada Mei 1998, kerjasama merambat dalam bidang ekspor dan impor. Dimana Arab Saudi dapat mengekspor produk minyak dan kimianya yang selama ini ditutup oleh Iran. Serta Arab Saudi maupun Iran bekerjasama dalam bidang penyiaran dan transportasi maupun tenaga kerja. Hal ini menurut Raja Fahd dapat menanggulangi krisis kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Arab Saudi maupun pengangguran di dua negara tersebut.

Sebuah MoU telah ditandatangani oleh kedua Negara pada Januari tahun 2000. Tujuan dibuatnya MoU ini adalah sebagai instrumen untuk mempromosikan perdagangan dan kerjasama investasi, membangun kerjasama dalam bidang navigasi, kerjasama konsul serta mengkoordinasi posisi kedua negara ini dalam organisasi regional maupun internasional. Dengan adanya MoU ini, volume kerjasama perdagangan antara kedua negara ini meningkat mencapai USD 133 juta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana Arab Saudi dapat mengekspor sebanyak 98% produknya ke Iran dari sebelumnya dan mengimpor produk dari Iran sekitar USD 40 juta pertahun (Keynoush, 2016).

*The Joint Economic Commission* ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kerjasama ekonomi antara Arab Saudi dan Iran. Komisi ini mendorong Bank agar dapat memperluas layanan keuangan dan asuransi guna melindungi perusahaan-perusahaan di Arab Saudi dan Iran. Pada Mei 2003, Arab Saudi maupun Iran menandatangani MoU di Pulau Kish, Iran Selatan untuk promosi dan proteksi investasi. Pada *The Joint Economic Commission* ke tujuh

yang dilaksanakan tahun 2005, menunjukkan bahwa kerjasama Arab Saudi dan Iran semakin erat bahkan kedua negara ini akan mulai mendiskusikan tentang perdagangan bebas untuk keuntungan perdagangan antar keduanya.

Sejak dibangunnya hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran pada tahun 1928 hingga 2015, Iran merupakan sahabat baik Arab Saudi, hal ini dapat dilihat dari kedekatan dan hubungan baik yang terjalin antara dua negara ini, smpupun peran Iran yang dianggap penting bagi Arab Saudi dikarenakan Iran merupakan negara dengan pengaruh cukup besar di kawasan Timur Tengah. Namun, pada tahun 2016 Arab secara mengejutkan dunia internasional dengan mendeklarasikan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Untuk itu, penulis tertarik untuk mencari tau alasan pemutusan hubungan diplomatik Iran oleh Arab Saudi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan muncul yaitu “Mengapa Arab Saudi memutus hubungan diplomatik terhadap Iran pada tahun 2016?”

## **C. Kerangka Teori**

Agar penelitian ini dapat semakin terarah dengan jelas, maka penulis mencoba menerapkan teori dalam ilmu hubungan internasional. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Politik Internasional.

## **1. Kebijakan Luar Negeri**

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan implementasi yang didasarkan pada politik luar negeri suatu negara. Menurut Mark R. Amstutz, politik luar negeri dibagi menjadi 3 tekanan utama, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melintasi batas-batas negara. Dengan demikian, semua kebijakan pemerintah yang berdampak pada aktor lain yang berada di luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan politik luar negeri. Definisi yang diberikan oleh Kegley & Wittkopf menekankan bahwa kebijakan luar negeri menjadi keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk mewujudkan tujuan internasional. Dalam hal ini, politik luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara dan pengertian untuk mencapai tujuan tersebut. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah terhadap aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya, perencanaan dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan nyata berupa: (USU, 2011).

Politik luar negeri adalah strategi implementasi yang dilaksanakan dengan menggunakan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan harapan pemerintah terpilih. Politik luar negeri suatu negara dapat beragam berdasarkan satu pemerintahan dengan menggunakan pemerintahan lain yang menggantikannya. Politik luar negeri suatu negara juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan di negara tersebut,

sehingga berbeda dengan politik luar negeri yang cenderung tetap, politik luar negeri bersifat temporer dengan menggunakan kondisi tersebut. politik luar negeri negara adalah bagian (instrumen) yang didasarkan pada politik luar negeri. Suatu negara biasanya berusaha untuk mewujudkan tujuan nasionalnya melalui perumusan kebijakan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, perilaku atau tindakan suatu negara merupakan hasil politik luar negeri yang didasarkan pada pemikiran dan pola tindakan yang disusun oleh para pengambil keputusan untuk (1) mengatasi masalah, (2) mencari perubahan lingkungan internasional. (Holsti, 1987).

## **2. Ekonomi Politik Internasional**

Pada awalnya, politik dan ekonomi adalah dua hal berbeda yang tidak dapat dipelajari sebagai satu kesatuan. Kajian politik merupakan kajian politik tinggi dalam bidang Hubungan Internasional, sedangkan pandangan ekonomi merupakan kajian politik rendah. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia II, gagasan menggabungkan studi ekonomi dan studi politik dicoba dilakukan (Mohtar Mas'oe'd, 1994).

Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat diartikan dengan 2 istilah, yaitu negara (state) & pasar (market). Ketika terjadi interaksi timbal balik antara keduanya, maka ekonomi dan politik keduanya saling mempengaruhi. Namun dalam perkembangannya, politik menunjukkan bahwa ekonomi lebih dominan. (Universitas Princeton, 2001)

Mohtar Mas'oe'd mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai

ilmu serius yang mempelajari hubungan timbal balik dan hubungan antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dan masyarakat.

Ekonomi politik dan ekonomi politik internasional memiliki disparitas yang mendasar. Robert Gilpin dalam bukunya *Global Political Economy* mengatakan bahwa inti kajian ekonomi politik adalah bagaimana pengetahuan yang ada dapat digunakan oleh negara sebagai wahana pengayaan. Sementara itu, ekonomi politik internasional memiliki penekanan utama untuk mengetahui bagaimana pasar dan aktor politik internasional terkait.

Dari kedua definisi tersebut dapat dibedakan dengan jelas antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik: ekonomi politik hanya menyelidiki ruang lingkup negara, bagaimana negara dapat meningkatkan kekayaannya; Sementara itu, ekonomi politik internasional memiliki cakupan yang lebih luas dimana akan mempelajari hubungan aktor-aktor internasional dalam upayanya meningkatkan perekonomian. (Mearsheimer, 2016)

Oleh karena itu, politik ekonomi sangat penting dan bisa mempengaruhi perekonomian negara maupun kawasan yang dapat mengarah kepada power suatu negara. Karenanya, politik suatu negara harus selalu dijaga karena mengarah kepada power yang dimiliki negara dikawasan tertentu.

#### **D. Hipotesis**

Arab Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran karena:



1. Arab Saudi memandang Iran sebagai ancaman dalam persaingan perdagangan minyak.
2. Arab Saudi memandang ekonomi Iran yang semakin berkembang dan mempengaruhi ekonomi politik internasional.

### **E. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat menempatkan manfaat dalam 2 bidang, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat secara akademis. Dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan masukan bagi perkembangan bidang studi Hubungan Internasional. Serta dapat dijadikan sebagai surat referensi untuk referensi dan pertimbangan bagi penulis lain yang ingin memperdalam kajiannya tentang Timur Tengah, khususnya mengenai perseteruan antara Arab Saudi dan Iran untuk menguasai kawasan di Timur Tengah. Kedua, manfaat praktis. Dalam penelitian ini dirasa perlu untuk dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tentang gosip di Timur Tengah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data menurut berbagai literatur seperti buku, jurnal, media elektronik dan situs internet yang dapat dijadikan bahan untuk memperjelas penulisan. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi tanda kebenaran sesuai hipotesis (Sugiyono, 2016).

Jadi, penelitian kualitatif yang dimaksud di sini adalah jenis penelitian yang membentuk suatu inovasi yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode perhitungan atau mekanisme statistik. Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang cakupan sosial (Rahmat, 2012).

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan pemahaman pada penelitian ini, maka sistematika penulisan yang akan disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan, diantaranya mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini, menjelaskan tentang sejarah hubungan bilateral Arab Saudi-Iran

Bab III: Dalam bab ini, Menjelaskan eskalasi konflik Arab Saudi-Iran

Bab IV: Dalam bab ini, menjelaskan penyebab putusnya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran, kemudian dianalisa melalui konsep ekonomi politik internasional.

Bab V : Menguraikan kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab IV disertai saran sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi.